

# **ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWERIGADING PALOPO**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO

Nurul Frida Aprilia<sup>1)</sup>, Hapid<sup>2)</sup>, Duriani<sup>3)</sup>

## **INTISARI**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada 3 Responden RSUD Sawerigading Palopo dan telah mengambil data keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam penerapan sistem pengelolaan keuangan BLUD, Rumah Sakit telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 14 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Dengan adanya penerapan sistem pengelolaan keuangan BLUD dapat memberikan fleksibilitas berupa probabilitas.

**Kata kunci : Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan BLUD, Rumah Sakit Umum Daerah.**

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to find out how the implementation of the financial management system of the Regional Public Service Agency at the Sawerigading Palopo Regional General Hospital. This research was conducted by conducting interviews with 3 respondents at Sawerigading Palopo Hospital and taking financial data in the form of a Budget Realization Report (LRA). The results of the study state that in implementing the BLUD financial management system, the Hospital has been guided by the Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) Number 79 of 2018 article 1 paragraph 1 to paragraph 14 concerning Regional Public Service Agencies. With the implementation of the BLUD financial management system, it can provide flexibility in the form of probabilities.*

**Keywords: Implementation of BLUD Financial Management System, Regional General Hospital.**

## **Pendahuluan**

### **Latar Belakang**

Pola baru pengelolaan keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara meliputi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang perbendaharaan negara, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum mengandung tiga kaidah manajemen keuangan negara yaitu: orientasi pada hasil, profesionalitas, dan akuntabilitas-transparansi. Yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 68 dan 69 menyatakan bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas.

Rumah Sakit adalah suatu unit kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan jasa pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pengelolaan unit usaha Rumah Sakit memiliki keunikan tersendiri, karena selain sebagai unit bisnis, usaha Rumah Sakit juga memiliki miosis sosial (Tinarbuka, 2011).

Rumah sakit pemerintah adalah rumah sakit yang dioperasikan oleh pemerintah, otoritas lokal, dan organisasi nirlaba. Berdasarkan hukum negara republik indonesia. nomor. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menjelaskan bahwa rumah sakit mempunyai fungsi sebagai berikut:(1) memberikan pelayanan pengobatan dan rehabilitasi sesuai standar rumah sakit; (2) memelihara dan meningkatkan kesehatan individu melalui pelayanan medis tingkat kedua dan ketiga yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan medis; dan (3) memberikan kapasitas pendidikan sumber daya manusia dalam meningkatkan pelayanan kesehatan (4) mengatur penelitian, pengembangan, dan teknologi laboratorium di bidang kesehatan, dengan memperhatikan etika

ilmu di bidang kesehatan, dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan.

Badan Layanan Umum Daerah merupakan bagian dari instansi pemerintah daerah dan tidak terpisah dari pemerintah daerah. Model Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah adalah model pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas dalam bentuk fleksibilitas untuk mengadopsi praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pekerjaan umum, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerahkan kehidupan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan perilaku kerja yang baik, dan kinerja organisasi berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di rumah sakit, dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan. Dalam pengelolaan keuangan, BLUD diberikan fleksibilitas antara lain berupa: (1) pengelolaan pendapatan dan biaya; (2) pengelolaan kas; (3) pengelolaan utang; (4) pengelolaan piutang; (5) pengadaan barang dan/atau jasa; (6) penyusunan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban (7) pengelolaan sisa kas di akhir tahun anggaran (8) pengelolaan dana secara langsung.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Paloposebagai unit yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sesuai dengan surat keputusan Walikota Palopo tanggal 09 April 2012 nomor : 397/IV/2012 tentang penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menerapkan PPK-BLUD dengan status BLUD penuh, dan mulai diterapkan sejak 01 Januari 2014.

Adanya keistimewaan yang diberikan kepada BLUD dikarenakan tuntutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari BLUD. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) merupakan perwujudan dari penyusunan anggaran yang disusun oleh BLUD untuk digunakan oleh BLUD itu sendiri. Berbeda dengan unit kerja Pemerintah Daerah lainnya yang menyusun anggarannya dengan menggunakan format Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Anggaran sektor publik merupakan salah satu fungsi perencanaan, pengelolaan, dan

akuntabilitas publik yang ditandai dengan penetapan indikator kinerja sebagai ukuran kuantitatif yang mencerminkan visi, misi, tujuan, sasaran, penetapan tujuan, dan tingkat keterwakilan instansi pemerintah yang memiliki sumber daya. Mencapai tujuan yang telah ditentukan. Anggaran pemerintah merupakan sarana pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program yang didanai publik. Pengembangan sistem anggaran publik telah menjadi alat politik multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi.

Fungsi anggaran pemerintah itu sendiri adalah alat perencanaan, alat manajemen, alat kebijakan fiskal, alat kebijakan, alat koordinasi dan komunikasi, alat review kinerja, alat motivasi, dan alat penciptaan ruang publik. Anggaran publik bertindak sebagai alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial dan ekonomi, memastikan keberlanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kebutuhan dan keinginan masyarakat tidak terbatas dan akan terus bertambah, sehingga anggaran diperlukan karena sumber daya yang tersedia untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakatnya terbatas. Anggaran juga membantu pemimpin mengenali penghematan baru sehingga koreksi di masa depan dapat dilakukan dan dicegah. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu memenuhi tingkat kebutuhan masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo, dengan bantuan dana BLUD (Badan layanan umum daerah) maka dari itu peneliti ingin mengetahui secara empiris sejauh mana Rumah Sakit menerapkan sistem pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD Sawerigading Palopo.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah “Bagaimanakah Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo ?”

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo.

### **Tinjauan Pustaka**

Secara umum pengelolaan keuangan berasal dari kata manajemen yang memiliki arti mengelola dan mengatur keuangan yang berarti hal-hal yang berkesinambungan dengan uang atau dana antara lain; pembiayaan, investasi, modal, dan belanja. Sehingga apabila disimpulkan manajemen keuangan dapat diartikan sebagai seluruh kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana cara pengelolaan keuangan yang dimulai dari memperoleh sumber pendanaan, menggunakan dana keuangan sebaik mungkin hingga mengalokasikan dana pada sumber-sumber investasi untuk mencapai tujuan Rumah Sakit (Armereo et al.:2020:1).

Proses pengelolaan keuangan ialah analisis keuangan merupakan fondasi atau tiang keuangan, dapat memberikan gambaran kesehatan keuangan perusahaan baik saat ini ataupun dimasa lalu, sehingga dapat dikelola untuk pengambilan keputusan bagi para manajer perusahaan yang berkaitan dengan itu dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang mendatang (Kuswadi 2005:3). Terdapat empat kerangka dasar pengelolaan keuangan :

#### 1. Perencanaan

Perencanaan merupakan kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Kuswadi (2005:6) kegiatan perencanaan pada keuangan, salah satunya adalah merumuskan sasaran keuangan tahunan dan jangka panjang, serta anggaran keuangan. Penyusunan anggaran merupakan proses untuk membantu melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian yang efektif. Menurut Sulistyowati et al. (2020:3).

Anggaran merupakan rencana perusahaan yang komprehensif dan tertulis secara kuantitatif untuk periode waktu tertentu atau yang telah ditentukan

sebelumnya. Anggaran adalah kunci sukses dalam mencapai tujuan bisnis sepenuhnya. Jenis-jenis anggaran gabungan adalah sebagai berikut :

- a. Anggaran produksi
- b. Anggaran penjualan
- c. Anggaran modal
- d. Anggaran laba

Perencanaan keuangan diperlukan agar dapat menyusun kebutuhan-kebutuhan dana untuk berbagai macam pembiayaan program dan kegiatan Rumah Sakit. Perencanaan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang paling sulit dilakukan karena adanya faktor ketidakpastiaan masa yang akan datang. Perencanaan perlu dilakukan secara terus menerus karena dengan berlalunya waktu, perusahaan perlu menyusun dan merevisi kembali rencana sebelumnya (Sulistyowati et al.:2020:2).

## 2. Pencatatan

Pencatatan merupakan kegiatan mencatat transaksi keuangan yang telah terjadi, penulisannya secara kronologis dan sistematis. Pencatatan sendiri digunakan sebagai penanda bahwa telah terjadi transaksi pada periode tersebut. Contoh pencatatan dapat berupa nota, kuitansi, faktur, dan lain-lain. Selanjutnya ialah menulis transaksi dalam jurnal, lalu diposting kedalam buku besar. Sebelum memulai pencatatan perlu dipahami prinsip-prinsip dasar dari pencatatan pengelolaan keuangan :

## 3. Pelaporan

Pelaporan merupakan langkah selanjutnya setelah selesai memposting ke buku besar, dan buku besar pembantu. Postingan dalam buku bsar dan buku besar pembantu akan ditutup pada akhir bulan, setelah itu akan dipindahkan ke ikhtisar laporan keuangan sbagai dasar penyusunan laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan ada laporan arus kas, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan.

## 4. Pengendalian

Pengendalian merupakan proses mengukur dan mengevaluasi kinerja aktual dari setiap bagian organisasi. Pengendalian dilakukan untuk menjamin bahwa perusahaan atau organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Kuswadi (2005:7) kegiatan dari pengendalian, salah satunya adalah pemantauan terhadap realisasi anggaran. Jenis pengendalian adalah pengendalian awal, pengendalian berjalan dan pengendalian umpan balik.

Pengelolaan Keuangan Hartati (2014) menyatakan mengorganisasikan administrasi sebenarnya merupakan pekerjaan yang sederhana dan tidak terlalu rumit. Menata administrasi dimulai dengan memilah-milah berkas atau file kedalam kelompok permasalahan yang sama atau serupa. Manajmen tidak dapat menyiapkan perencanaan tanpa adanya data yang akurat . Kegiatan adaministrasi yang perlu dilaksanakan perusahaan :

### 1. Administrasi piutang

Piutang adalah kekayaan perusahaan yang di dalam laporan neracadiletakkan pada sisi asset atau aktiva. Administrasi piutang merupakan catatan yang penting. Catatan yang benar dan terkini sebagai informasi internal dan eksternal. Dalam kondisi eksternal piutang dapat dijadikan agunan kepada pemberi pinjaman untuk megatasi keuangan jangka pendek. Manfaat bagi informasi internal adalah untuk perencanaan dan evaluasi atau pengendalian

### 2. Administrasi Hutang

Hutan adalah kewajiban Perusahaan kepada pihak ketiga. Dalam neraca, kreditur ditempatkan pada sisi pasif atauliability. Pencatatan menentukan kewajiban perusahaan sama pentingnya dengan piutang. Laporan Status Utang memperingatkan pengusaha untuk mengambil beberapa langkah-langkah proaktif.

### 3. Administrasi Persediaan

Persediaan merupakan kekayaan perusahaan. Dalam neraca akun persediaan diletakkan pada sisi aktiva di bawah akun piutang. Persediaan memiliki peran yang strategic baik usaha yang bergerak di bidng

perdagangan maupun manufaktur. Administrasi yang dilakukan secara tepat waktu sangat membantu pemilik usaha mengambil keputusan kapan harus membeli kembali atau menjaga agar tidak kehabisan persediaan.

#### 4. Administrasi Asset Tetap

Asset tetap merupakan kekayaan perusahaan yang di dalam neraca diletakkan pada sisi asset di bawah persediaan. Aset tetap berpotensi menjadi modal dengan catatan data tentang setiap asset yang dimiliki perusahaan tercatat dengan tertib dalam administrasi asset. Pencatatan atas asset tetap berfungsi untuk menunjukkan kapan barang tersebut dibeli kemudian digunakan untuk menentukan tingkat penyusutan dan mulai berlakunya serta waktu berakhirnya.

#### 5. Administrasi Kas

Uang kas merupakan kekayaan perusahaan yang di dalam neraca diletakkan pada sisi asset dan ditempatkan paling atas. Jumlah kas lazimnya tidak besar dan ketersediaannya secukupnya untuk mendukung kegiatan perasional sehari-hari. Uang tunai didalam kas perlu dijaga jumlahnya yakni sebesar kebutuhan operasional. Pencatatan uang kas sangat berguna dalam memberikan informasi tentang berapa jumlah uang kas yang masuk dan yang keluar sehingga menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran.

#### 6. Administrasi Penggajian

Administrasi penggajian merupakan bagian dari manajemen personalia. Dalam system administrasi keuangan, administrasi penggajian masuk ke dalam kelompok biaya. Pencatatan tentang penggajian akan menginformasikan tentang jumlah biaya yang dibayarkan untuk upah pegawai. Administrasi penggajian juga sebagai dasar dalam perhitungan pajak. Manfaat lainnya untuk menjaga keseimbangan antara perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan sehubungan dengan kinerja karyawan

#### 7. Administrasi Lainnya

Administrasi surat masuk, surat keluar, pencatatan tentang berbagai kebijakan perusahaan, administrasi sewa-menyewa asset, kerjasama serta kegiatan langsung yang dilakukan oleh perusahaan.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas..

Satuan kerja yang memperoleh pendapatan dari layanan kepada publik secara signifikan dapat diberikan keleluasaan dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan. Hal ini merupakan upaya pengagenan aktivitas yang tidak harus dilakukan oleh lembaga birokrasi murni, tetapi oleh instansi pemerintah daerah yang dikelola “secara bisnis”, sehingga pemberian layanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif yaitu dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Penerapan (*implementasi*) terjadi apabila sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau suatu rencana telah disusun dengan baik terlebih dahulu sehingga telah ada kepastian dan kejelasan tentang rencana tersebut. Penerapan sistem atau implementasi adalah menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek atau efek pada sesuatu. Ini adalah kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara serius dan yang menetapkan kriteria tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Sistem menurut Mulyadi (2017:2) adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem juga terdiri dari unsur-unsur yang merupakan bagian terpadu dari berbagai subsistem yang bersangkutan. Unsur-unsur sistem tersebut juga bekerja bersama untuk mencapai tujuan dari subsistem itu sendiri dan bagian dari sistem lain yang lebih besar dalam mendukung pencapaian tujuan.

Secara etimologi atau bahasa, kata manajemen diambil dari bahasa Prancis kuno, yaitu *management* yang merupakan seni dalam mengatur, mengelola dan melaksanakan. Manajemen dapat juga diartikan sebagai upaya atau usahapengoordinasian, pengontrolan, perencanaan, serta pengorganisasian sumber daya untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif. Inilah yang mendasari bahwa pengertian manajemen ialah sebuah seni. Seni dalam arti dekat dengan keindahan. Suatu keindahan manajemen yang teratur, rapi, dan tersusun rapih.

Menurut Firmansyah (2018:4) manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.

Menurut Sarinah & Mardalena (2017:7) manajemen adalah suatu proses dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja bersama melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya.

Menurut Afandi (2018:1) Manajemen adalah proses kerja sama antar karyawan untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan pelaksanaan fungsifungsi perencanaan, pengorganisasian, personalia, pengarahan, kepemimpinan, dan pengawasan. Proses tersebut dapat menentukan pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditentukan dengan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya untuk mencapai hasil lebih yang efisien dan efektif.

Fungsi manajemen ialah untuk mengatur dan membuat tatanan tersusun yang rapih. Manajemen mengatur yang belum teratur sedemikian rupa

sehingga diubah menjadi pola baru. Selain konsep etimologis, konsep manajemen juga dikemukakan oleh para profesional di bidang manajemen.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moloeng (2018) ialah penelitian yang bertujuan agar memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh partisipan seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Sehingga pada penelitian ini data yang telah dikumpulkan merupakan data kualitatif dengan instrumen pengumpul data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dan data yang di peroleh cenderung data kualitatif dengan teknik analisis data yang bersifat kualitatif (Sugiyono, 2019). Untuk mengetahui penerapan sistem pengelolaan keuangan BLUD pada RSUD Sawerigading Palopo, penelitian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan prepenelitian di RSUD Sawerigading Palopo, agar diperoleh data primer dan data sekunder. Data pendukung dikumpulkan dari bagian terkait yang meliputi RBA, RSB, SPM, laporan keuangan, kerjasama RSUD dengan pihak luar, data pegawai, deskripsi fisik rumah sakit, data organisasi dan manajemen
2. Melakukan wawancara menggunakan panduan wawancara yang dilakukan kepada beberapa pegawai dan staf di RSUD Sawerigading Palopo. Pelaksanaannya menggunakan media perekam dan catatan lapangan (*field notes*).
3. Tabulasi hasil pertanyaan serta analisis data
4. Menggunakan penilaian aspek keuangan sebagaimana yang dimaksud meliputi rasio keuangan dan kepatuhan pengelolaan keuangan BLUD.

Pada penelitian ini data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung kepada pihak yang terkait. Sedangkan

data sekunder merupakan data yang telah tersedia dan dikumpulkan pihak lain.

Adapun sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara pihak yang berkaitan seperti wawancara kepada :

1. Kepala Bagian Keuangan,
2. Sub. Bagian Anggaran dan Perbendaharaan,
3. dan Sub. Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca tahun 2020-2021 yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sangat penting karena berhubungan dengan tersedianya data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, sehingga kesimpulan yang diperoleh adalah benar. Oleh karena itu dalam penelitian, teknik pengumpulan data harus dilakukan dengan tepat dan benar. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Observasi

Observasi merupakan observasi langsung dan mendetail terhadap objek untuk memperoleh informasi yang benar tentang objek tersebut. penelitian yang diperiksa dan diamati dirancang untuk mengumpulkan data atau skor. Observasi pada penelitian ini digunakan untuk meneliti bagaimana penerapan sistem pengelolaan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo.

b. Wawancara

Penulis melakukan penelitian dan mengumpulkan data melalui wawancara terhadap staf Sub. Anggaran dan Perbendaharaan RSUD Sawerigading Palopo untuk proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab dan bertatap muka antara penanya dan penjawab.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengambil data-data dari

catatan dan dokumentasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip arsip-arsip dari Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo.

### **Hasil dan Pembahasan**

Penelitian yang dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo di mulai tanggal 13 Juni 2022 sampai pada tanggal 11 Agustus 2022. Dalam proses pengambilan data, hal pertama yang dilakukan peneliti yaitu berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo untuk menjumpai Kepala Bagian Keuangan sekaligus menyerahkan surat pengantar izin untuk melakukan penelitian (Senin, 13 Juni 2022). Dan selanjutnya melakukan pengambilan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi serta menemui Informan lainnya.

Sebagai unit pelayanan publik yang menetapkan penerapan sistem pengelolaan keuangan BLUD penuh sesuai Sesuai Surat Keputusan Walikota Palopo tanggal 9 April 2012 nomor 397/IV/2012 tentang penetapan RSUD Sawerigading Palopo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan sistem pengelolaan keuangan BLUD penuh, meskipun penerapan pelaksanaannya baru dimulai sejak 1 Januari 2013 dalam pengelolaan (manajemen) dituntut untuk profesional dengan konsep bisnis yang sehat dan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan.

Dalam penerapan sistem pengelolaan keuangan, Pemerintah melalui Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 telah mengatur keputusan untuk menjalankan dan mengikuti peraturan tersebut dengan penuh tanggung jawab berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018. Kegagalan penerapan sistem pengelolaan keuangan BLUD pada RSUD Sawerigading Palopo akan mengakibatkan lemahnya pengelolaan keuangan dan pelaporan pemerintah yang tidak berfungsi. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan RSUD Sawerigading Palopo akan berdampak serius pada kualitas pekerjaan di dalam dan di luar Rumah Sakit.

Status BLUD rumah sakit telah diperoleh tanpa didahului oleh kesiapan semua pihak rumah sakit dalam melakukan berbagai perubahan sesuai dengan tujuan pemerintah menjadikan rumah sakit sebagai BLUD, sehingga perubahan dan penyesuaian yang perlu dilakukan berjalan lambat dan bertahap. Perbaikan atas sistem pengumpulan data pengelolaan keuangan perlu dilakukan. Peningkatan nilai kinerja keuangan tidak dapat berjalan dengan sendirinya, karena sangat terkait dengan aspek-aspek lainnya seperti adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pelaksanaan tata kelola yang berjalan baik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi yang di butuhkan, pengelolaan sumber daya yang baik dan tertib serta keandalan sumber data kinerja.

Dalam hal ini pendapatan pada Tahun Anggaran 2021 dialokasikan sebesar Rp.66.576.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.67.527.517.901,27 atau 101,43%. Belanja barang dan jasa pada RSUD Sawerigading Palopo mempunyai anggaran sebesar Rp.33.396.158.874,13 atau 93,34%. Adapun belanja modal RSUD Sawerigading Palopo sebesar Rp.27.157.334.073,00 atau 97,53%. Peningkatan pada aset dapat dilihat dari pos-pos, dimana aset lancar mempunyai total sebesar Rp.37.487.183.360,00. Adapun persediaan bahan habis pakai mempunyai total sebesar Rp.5.461.480.481,00, Kewajiban RSUD Sawerigading Palopo mempunyai total sebesar Rp.29.163.777.051,00 dari hutang usaha dan hutang jangka pendek lainnya. Adapun ekuitas dana investasi sebesar Rp.208.441.003.428,00 yang di dapat dari investasi aset tetap dan investasi aset lainnya.

Hasil dari analisis rasio keuangan RSUD Sawerigading Palopo dapat dilihat dari laporan keuangan. Rasio kas sebesar 15,09% itu berarti skor rasio kas BLUD RSUD Sawerigading Palopo sebesar 0,25. Rasio lancar sebesar 128,54% itu berarti rasio lancar BLUD RSUD Sawerigading Palopo sebesar 0,5. Periode penagihan piutang sebesar 147,27% itu berarti skor BLUD RSUD Sawerigading Palopo sebesar 0. Perputaran aset

tetap sebesar 75,54% itu berarti skor dari BLUD RSUD Sawerigading Palopo sebesar 2. Imbalan atas aset tetap sebesar 10,44% itu berarti skor dari BLUD RSUD Sawerigading Palopo sebesar 2. Imbalan ekuitas sebesar 7,84% itu berarti skor dari BLUD RSUD Sawerigading Palopo sebesar 1,8. Perputaran persediaan sebesar 29,12% itu berarti skor dari BLUD RSUD Sawerigading Palopo sebesar 1,5. Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional sebesar 64,37% itu berarti skor BLUD RSUD Sawerigading Palopo sebesar 2,25. Rasio Subsidi Biaya Pasien sebesar 40,91% itu berarti skor dari BLUD RSUD Sawerigading Palopo sebesar 0,5. Seluruh nilai dan skor rasio yang ada pada Rumah Sakit dinilai Baik untuk RSUD Sawerigading Palopo.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

*Alhamdulillahirobbil 'Alamin.* Penelitian ini sampai pada akhir perjalanannya sesuai dengan judul penelitian ini adalah Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Saki Umum Daerah Sawerigading Palopo. Melalui metode kualitatif peneliti telah menggali, memahami, dan menjelaskan pengetahuan lebih dalam mengenai Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Saki Umum Daerah Sawerigading Palopo. Berdasarkan hasil wawancara dan data yang telah dikumpulkan, adapun yang penulis dapatkan adalah :

Bentuk penerapan sistem pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum RSUD Sawerigading Palopo yaitu berupa peningkatan pelayanan terhadap masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan meningkatkan kinerja keuangan. Adapun hasil dari analisis rasio keuangan RSUD Sawerigading Palopo yang berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-34/PB/2014 Lampiran 1:II dapat dilihat dari laporan keuangan. Hasil dari analisis rasio keuangan dapat dilihat dari laporan keuangan. Rasio kas sebesar 15,09% itu berarti skor rasio kas sebesar 0,25. Rasio lancar



sebesar 128,54% itu berarti rasio lancar sebesar 0,5. Periode penagihan piutang sebesar 147,27% itu berarti skor sebesar 0. Perputaran aset tetap sebesar 75,54% itu berarti skor dari sebesar 2. Imbalan atas aset tetap sebesar 10,44% itu berarti skor dari sebesar 2. Imbalan ekuitas sebesar 7,84% itu berarti skor dari sebesar 1,8. Perputaran persediaan sebesar 29,12% itu berarti skor dari sebesar 1,5. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional sebesar 64,37% itu berarti skor sebesar 2,25. Rasio Subsidi Biaya Pasien sebesar 40,91% itu berarti skor dari sebesar 0,5. Seluruh nilai dan skor rasio yang ada pada Rumah Sakit dinilai Baik untuk RSUD Sawerigading Palopo.

### Saran

Perlu adanya kecepatan dan ketepatan waktu dalam proses pelaporan pada pengumpulan dokumen agar ketika RSUD Sawerigading menerima barang yang masuk, dokumen dan barang yang tersedia serta yang telah terpakai diketahui dan tervalidasi bahwa adanya fisik (barang yang masuk) dengan dokumen. Sehingga tidak terjadinya kesulitan dalam penyandingan barang. Penambahan sumber daya manusia juga perlu dilakukan.

### Daftar Rujukan

- Afdan Rojabi. *Teknik Wawancara (Research Methodology)*. Okt 22. 2019.
- Armereo, C., Marzuki, A., dan Seto, A. A. (2020). *Manajemen Keuangan* (N. L. Inspirasi (ed.); Pertama). Nusa Litera Inspirasi
- Asmara Hadi. 2019. *Evaluasi Implementasi Badan Layanan Umum di RSUD M YUNUS Bengkulu Tahun 2014*. Universitas Bengkulu Indonesia
- Astuty, H. S. (2019). *Praktik Pengelolaan Keuangan Wirausaha Pemula*. Deepublish.
- Bambang Azis Silahahi, dkk. 2022. *Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai*. Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Medan Area Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sumatera Utara. Indonesia
- Djuhaeni. Henni. 2006. *Sistem Penganggaran Rumah Sakit*. Unpad. Bandung
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Handayani, Fitri (2021) *Analisis Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Layz Cake and Bakery*. Skripsi thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- Haryati, Nuning Tri (2017) *Analisis implementasi anggaran berbasis kinerja dalam pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada rumah sakit umum daerah prof. dr. margono soekarjo purwokerto*. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.
- Kementerian Keuangan. 2015. *Siklus Anggaran*. Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Mia Khairina. 2017. *Analisis Implementasi Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
- Nanang Nopriandy P. 2017. *Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan kinerja Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Makassar*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
- Purba, D. S., Kurniullah, A. Z., Banjarnahor, A. R., Revida, E., Purba, S., Purba, P. B., Sari, A. P., Hasyim, H., Yanti, Y., dan Butarbutar, M. (2021). *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah*. Yayasan Kita Menulis.
- Ratna Suryaningsih. 2018. *Kinerja Keuangan Layanan Kesehatan Sebelum Dan Sesudah Penerapan PPK-BLU. Vol.15, No.1*
- Reni Riawati, Firman Pribadi. 2018. *Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Rumah*

*Sakit Panembahan Senopati Bantul*. Master of Hospital Management Muhammadiyah University of Yogyakarta.

- Riani Isye Kawenas, Lintje Kalangi, Linda Lambey. 2019. *Analisis Penerapan PSAP Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Pada RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado*. Program Magister Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyowati, C., Farihah, E., dan Hartadinata, O. S. (2020). *Anggaran Perusahaan: Teori Dan Praktika*. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.
- Syahril. 2017. *Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep*. Vol3 No 1 (2013): Performance : Jurnal Bisnis & Akuntansi
- Trie Nadilla. Hasan Basri. Heru Fahlevi. 2017. *Identifikasi Permasalahan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD)-Studi Kasus Pada Rumah Sakit Permata dan Rumah Sakit Berlian*. Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
- U. Vina Dwirista. 2017. *Analisis Penerapan Pola Penelolan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sambas Kabupaten Sambas*. Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi
- Uce Binsar Sahat Maruli Sitinjak. 2017. *Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Karimun*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Yeni Priatna Sari, Hetika. dan Nurul Mahmudah. 2021. *Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Akruah Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kardinah Kota Tegal*. *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 1 2017* ISSN.: 2528 -6145